

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.
- A.P Parlindungan, *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform*, Bagian I, Bandung, 1989.
- , *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1991.
- , *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm.127.
- Benhard Limbong, “*Konflik Pertanahan*”, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta, Djambatan, 2007.
- Bruce J Cohen a.b Simarona Sahat, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rineke Cipta, 1992.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994.
- Fidel, *Cara Mudah Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Ke-1, Februari 2010.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien (selanjutnya disingkat Hans Kelsen III), Nuansa & Nusamedia, Bandung, 2006.
- , *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara*, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.

-----, Teori Hans Kelsen, *Tentang Hukum*, cetakan ke-2, terjemahan Jimly Asshiddiqe dan M.Ali Safa'at, Konstitusi Press, (selanjutnya disingkat Hans Kelsen I), Jakarta, 2012.

Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003.

Irene Eka Sihombing, *Segi-Segi Hukum Tanah Nasioanal dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Cetak. I (Jakarta: Universitas Trisakti, September 2005).

Iwan Mulyawan, *Panduan Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Banguna (BPHTB) Sesuai dengan Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2009*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010.

J. B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.

M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994).

Muctar Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, (Jakarta: Republika, 2008).

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga*, Surabaya, tanpa tahun.

R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group.

Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Salim Haji Said., *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Rajagrafindo Persada, cetak 1, 2016.

Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, edisi 4, cetakan 1, Bandung, Rafika Aditama, 2003.

Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Saut P. Panjaitan, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Asas, Pengertian, dan Sistematika). Penerbit.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981).
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- , *Sosiologi Satu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 2002.
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi baru. Jakarta : Rajawali Pers, 2009.
- Sudikno Mertokusumo (Selanjutna disebut Sudikno Mertokusumo- II), *MengeSuatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 2002.
- , *Sosiologi Suatu Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- , *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Prenadamedia Group ,Jakrta, 2015.
- , *Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta*, PT Kharisma Putra Utama, Cetakan ke-1, Januari 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1990/1991.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Pajak Penghasilan Sebagai Mana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang PDRD.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 261/PMK.03/2016 Tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PMNA/KaBPN 3/1997).

Keputusan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 Tentang Pengesahan Kode Etik IPPAT.

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-18/PJ/207 Tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Beli Atas Tanah dan/atau Bangnan Beserta Perubahannya.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Perka BPN 23/2009).

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Perka BPN).

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar No.6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB).

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar No.11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar No.3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia (Kode Etik IPPAT) Nomor 12/PPIPPAT/1/2017.

C. Tesis

